

Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa

Ari Setyowati

Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia

Email: ¹⁾ ari@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [06 September 2023]

Revised [15 Oktober 2023]

Accepted [29 Oktober 2023]

KEYWORDS

Indonesian foreign policy, leadership, diplomacy, political dynamics.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sejarah dan perkembangan politik luar negeri Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soekarno, dimana pada masa kepemimpinan Soekarno kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan yaitu kebijakan yang semula tidak bersifat militan atau cenderung dengan diplomasi berubah menjadi sebuah kebijakan perjuangan dengan semangat patriotisme yang bersifat militan dan konfrontasi dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Pergantian masa kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto menandai babak baru dari orde lama ke orde baru. Politik luar negeri pada masa Soeharto memiliki karakter low profile, kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan dengan pendekatan yang lebih lunak dan terkesan bersahabat dalam hubungannya dengan luar negeri dan cenderung ke negara Barat. Kemudian perkembangan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi mengalami perkembangan, politik luar negeri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki sebuah incaran utama yaitu lebih fokus untuk meningkatkan peran dan status Indonesia di percaturan politik internasional. Selanjutnya kebijakan politik luar negeri pada kepemimpinan Jokowi dapat terlihat dengan tujuannya mewujudkan diplomasi yang berhubungan dengan sifat kerakyatan, bisa diartikan dengan langkah untuk mewujudkan diplomasi yang bermasyarakat, sehingga kebijakan politik luar negeri Jokowi lebih bersifat ke dalam (inward looking). Melihat karakter politik luar negeri terus mengalami perubahan dan perkembangan, pada prinsipnya dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara biasanya berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusinya. Namun pada pelaksanaannya seringkali perumus kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kepentingan, kepemimpinan dan dinamika politik internal dan internasional pada waktu tertentu.

ABSTRACT

The history and development of Indonesia's foreign policy continues to change from time to time. Starting from the leadership of President Soekarno, where during Soekarno's leadership, Indonesia's foreign policy underwent a change, namely a policy that was originally not militant or tended to be diplomacy turned into a policy of struggle with a spirit of patriotism that was militant and confrontational in fighting imperialism and colonialism. The change of leadership from Soekarno to Soeharto marked a new chapter from the old order to the new order. Foreign policy during the Soeharto era had a low profile character, Indonesia's foreign policy was carried out with a softer approach and seemed friendly in its relations with foreign countries and tended to Western countries. Then the development of Indonesia's foreign policy after the reformation experienced development, the foreign policy of the Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) era had a main target, which was more focused on increasing Indonesia's role and status in the international political arena. Furthermore, foreign policy in Jokowi's leadership can be seen with his goal of realizing diplomacy related to populist nature, which can be interpreted as a step towards realizing community diplomacy, so that Jokowi's foreign policy is more inward looking. Seeing that the character of foreign policy continues to undergo changes and developments, in principle the basis of a country's foreign policy is usually rooted in its history, ideology and constitution. However, in practice, foreign policy formulators are often influenced by various factors, namely interests, leadership and internal and international political dynamics at any given time.

PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdaulat, pasti akan merumuskan kebijakannya baik kebijakan dalam negerinya maupun hubungan dengan dunia internasional, baik antar negara lain maupun dengan organisasi yang berpengaruh di dunia internasional. Kebijakan tersebut merupakan suatu bagian dari politik luar negeri yang dilaksanakan oleh suatu negara dan hal tersebut merupakan penggambaran dari kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia, sebagai suatu negara yang berdaulat, juga melaksanakan politik luar negerinya dimana kebijakan-kebijakannya akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi serta kondisi internasional. Setiap periode pemerintahan, pasti mempunyai pandangan yang bermacam-macam terhadap prinsip yang menjadi dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Adanya perbedaan pandangan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kebijakan luar negeri suatu negara akan berjalan sesuai dengan perkembangan internasional

dan domestic. Begitu pula yang terjadi pada kebijakan luar negeri Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negerinya dan konstelasi politik internasional. Dalam rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, nampak jelas pola kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemerintahannya yang dipengaruhi oleh politik dunia serta juga disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri.

Sejarah dan perkembangan kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan karakter dari masa ke masa, dimulai sejak awal kemerdekaan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga pada masa sekarang yakni pemerintahan Presiden Jokowi. Perubahan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi negara, kepemimpinan pada masa itu dan dinamika situasi internasional. Sebagaimana telah diketahui bahwa kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri suatu negara. Interaksi politik domestic suatu negara yang mana proses dan outputnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Kepentingan dalam negeri tentu akan mempengaruhi perumusan kebijakan luar negerinya. Sistem pemerintahan dan karakter pemimpinnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil. Hubungan antara politik domestic dan kebijakan luar negeri dapat dijelaskan melalui two-level game approach sebagaimana dijelaskan oleh Putnam. Putnam memberikan perumpamaan bahwasanya pemimpin suatu negara berada di posisi di antara dua meja. Salah satu meja tersebut merepresentasikan politik domestic sedangkan meja lain mempresentasikan negosiasi internasional. pemimpin suatu negara melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan, yang mana pemimpin harus mampu untuk melakukan tawar menawar dengan kedua meja tersebut dengan baik sehingga dapat mencapai persetujuan internasional dan juga memberikan keuntungan bagi negara secara domestik.

LANDASAN TEORI

Untuk melihat kaitan antara politik domestic dan kebijakan luar negeri, penulis menggunakan tinjauan pustaka dari berbagai literatur mulai dari beberapa referensi buku, jurnal ilmiah, internet juga melakukan review dari beberapa jurnal penelitian dan teori-teori yang dikemukakan oleh para scholar. Diantaranya teori yang dikemukakan oleh Richard Snyder dkk menjelaskan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Penulis juga mencoba menganalisa korelasi antara politik luar negeri sebuah negara berkaitan erat dengan politik dalam negerinya, kepentingan nasional merupakan elemen penting yang kemudian dapat menjadi bagian dari sumber formulasi dan implementasi politik luar negeri, oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu mengenal konsep kepentingan nasional yang kemudian nantinya akan digunakan dalam perumusan politik luar negeri yang berorientasi kerakyatan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analysis* yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Analisa dilakukan melalui pengumpulan data, dimana data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk menguji hipotesis serta menjawab pertanyaan terkait subjek yang sedang diteliti sehingga memberikan gambaran dengan interpretasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki tujuan/ kepentingan nasional yang harus dicapai. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negara, instrumen yang di gunakan dalam mencapainya adalah adanya politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh dinamika-dinamika dari dalam negeri dan internasional. Hal ini juga yang terlihat pada perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam mengusahakan kepentingan nasionalnya, yang artinya tidak berpihak pada sisi manapun dan bebas memilih kerja sama dengan pihak manapun selama hal itu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia dengan ikut serta dalam hubungan internasional. Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Dimulai pada masa orde lama dengan kepemimpinan Presiden Soekarno, politik luar negeri yang dijalankan di Indonesia dengan prinsip bebas aktifnya, yang artinya bebas tidak memihak blok manapun tetapi pada implementasinya cenderung menunjukkan kedekatan terhadap negara-negara di blok Timur atau negara-negara dengan haluan komunis. Indonesia bahkan pada masa kepemimpinan Soekarno

menerapkan prinsip nasional-sosial-komunis sebagai elemen di setiap jenjang pemerintahannya, tindakan yang diambil lebih bersifat konfrontatif, hal ini terlihat dari sikap tegas Soekarno dalam perkataan dan sikapnya. Soekarno secara tegas menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika. Indonesia menunjukkan posisinya dalam persahabatan dunia yang lebih kepada perasaan senasib sebagai negara penentang kolonialisme.

Pada masa orde lama, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh semangat patriotisme pasca kolonial. Agenda utama kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Soekarno adalah fokus mencari pengakuan dari negara-negara lain di dunia yang diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatic dengan berbagai negara di dunia. Sebagai negara yang baru berdiri pasca memproklamkan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia pada saat itu mencoba membangun profilnya dalam dunia internasional. Kondisi ekonomi yang relatif lemah namun memiliki semangat patriotisme yang besar membuat pemerintah harus menentukan arah kebijakan luar negerinya dengan cara membangun citra Indonesia terlebih dahulu. Pada saat itu politik luar negeri Indonesia berada pada posisi yang netral diantara dua kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Presiden Soekarno tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideology yang sedang berkembang pada saat itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa orde lama cenderung bersifat hard profile. Hal ini didasarkan pada pola interaksi dan hubungan luar negeri yang dibangun pada masa Soekarno. Soekarno secara tegas dan jelas melakukan penentangan terhadap bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan berhasil menggalang persatuan diantara negara-negara terjajah dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Soekarno ingin menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam dunia Internasional, ketegasan yang lebih besar lagi yang dibangun oleh Soekarno dalam politik luar negeri Indonesia adalah ketika memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika pada masa Orla, profil kebijakan luar negeri Indonesia cenderung bersifat hard profile dengan pendekatan yang keras, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru (Orba). Pemerintahan Orba cenderung menerapkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berubah 180 derajat dari pendahulunya yaitu pendekatan yang lebih bersifat low profile.

Pada masa Soeharto, kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan pendekatan yang lebih lunak dan terkesan bersahabat dalam hubungannya dengan luar negeri. Sebagai contohnya pendekatan Indonesia terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang terdekat secara geo-politik dan geo-ekonomi serta dianggap sebagai potensi utama peluang dan ancaman bagi Indonesia. Pendekatan yang dilakukan diantaranya dengan mengusulkan tentang pembangunan sebuah hubungan persahabatan diantara negara-negara di wilayah Asia Tenggara dalam sebuah forum kerjasama bernama ASEAN. Meskipun terdapat keraguan dari beberapa negara diantaranya Malaysia dan Filipina terhadap usulan Indonesia ini, namun pada akhirnya kesepakatan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk forum kerjasama di bawah ASEAN terwujud.

Hubungan Indonesia dengan negara barat yang sempat tegang pada masa orde lama, direvitalisasi oleh pemerintahan orde baru. Dimana pemerintahan orde baru yang pro developmentalist membutuhkan banyak dukungan dari negara-negara barat untuk melakukan pembangunan secara ekonomi. Sehingga perubahan kebijakan politik luar negeri yang pada rezim sebelumnya memiliki profile keras dan cenderung konfrontasi atau militan mengalami perubahan diganti dengan profile yang lebih lunak dan bersahabat dengan negara-negara barat. Hasilnya, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak mendapatkan dukungan dari berbagai negara barat dan dukungan tersebut lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi dalam negeri, tetapi ada kelemahan pada rezim Soeharto dimana pendekatan yang bersifat soft profile pada kebijakan politik luar negerinya, namun pendekatan di dalam negeri nya justru bersifat hard profile, sehingga pemerintahan bersifat sentralistik dan otoriter. Jika diamati pada pola kebijakan luar negeri pada dua rezim di atas jelas, pada dasarnya perumusan kebijakan yang sama-sama terpusat kepada Presiden. Pada masa orde lama kebijakan luar negeri Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan Soekarno dalam melihat posisi Indonesia di dunia Internasional, sehingga pemikiran anti kolonialisme terimplementasi dalam kebijakan luar negerinya yang kemudian berseberangan dengan Barat. demikian pula pada masa orde baru, kebijakan luar negeri Indonesia dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan sistem politik yang terpusat pada Presiden, kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara pandang Soeharto terhadap posisi Indonesia dan juga kondisi Internasional. Dimana pada masa Soeharto lebih pro terhadap pembangunan ekonomi sehingga memandang negara Barat adalah sebuah peluang untuk melakukan kerjasama ekonomi.

Memasuki masa reformasi, terdapat perubahan fundamental dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, perubahan tersebut adalah terletak pada pola perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dari executive heavy kepada public heavy. Artinya jika pada dua rezim sebelumnya kebijakan luar negeri

dipengaruhi oleh presidennya sebagai pemimpin. Dengan berkembangnya proses demokrasi di Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi di dominasi oleh presiden namun terbuka kesempatan kepada publik untuk ikut serta memberikan pendapat, pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan selalu berpegang pada prinsip bebas aktif tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional dengan maksud mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri pada era reformasi dalam hal ini pada masa pemerintahan SBY, kebijakan-kebijakan politik luar negerinya paling menonjolkan konsep diplomasi soft power. Soft power menjadi bentuk diplomasi yang dapat dilakukan lewat berbagai bidang selain militer, seperti pertukaran budaya, kerja sama ekonomi, pendidikan, investasi, dialog antar agama dan lain sebagainya. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Presiden SBY memiliki filosofi bahwa apabila menggunakan hard power, orang akan lebih melawan akan tetapi jika menggunakan soft power, yakni berupa persuasif, pendekatan budaya, psikologis dan sebagainya, ini akan membuat lebih diterima. Hanya dalam implementasinya, prinsip ini menjadikan Indonesia dilema dalam menentukan sikap. Indonesia menjadi lemah dan tidak menunjukkan ketegasan dalam bersikap. Konstruksi pemikiran politik luar negeri Presiden SBY sering menekankan konektivitas, sebagai wujud upaya Indonesia agar mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak dengan memanfaatkan proses diplomasi soft power nya. Hubungan yang baik dengan semua pihak dianggap mampu menentukan pengaruh dan kemampuan Indonesia dalam keterlibatannya membentuk tatanan dunia yang dikehendaki. Namun politik luar negeri pada rezim SBY sering dianggap lemah dalam menunjukkan kedaulatan Indonesia. Identitas politik luar negeri Indonesia sebatas pada konsep mengedepankan soft power, akan tetapi karakter yang tegas, terkait identitas negara seperti apa belum terwujud. Hal inilah yang dianggap tidak cukup menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia tidak cukup tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah teritorinya yang terkait dengan hubungan luar negeri.

Pada rezim Presiden Jokowi kebijakan politik luar negeri nya jika diamati lebih cenderung mengutamakan penguatan dalam negeri nya. Politik luar negeri masih tetap menggunakan prinsip bebas aktif, namun pelaksanaan politik bebas aktif dari masa Soekarno sampai dengan masa Jokowi memiliki perubahan makna yang disesuaikan dengan kondisi yang ada , kebijakan luar negeri era Jokowi memiliki beberapa tujuan demi mencapai kepentingan nasional diantaranya :

1. Mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan menjalin kerjasama internasional. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menggambarkan seruan besar untuk kembali ke jati diri negara Indonesia yaitu negara kepulauan.
2. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik.
3. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi dan keterlibatan masyarakat.

Fokus kebijakan luar negeri Indonesia juga tetap pada isu-isu ekonomi yang meberikan manfaat secara nyata bagi Indonesia. Sebagai contoh saat Indonesia sedang menggerakkan beberapa perundingan ekonomi yang meliputi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang diambil dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepentingan nasional yang nyata dan manfaatnya secara langsung.

Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Jokowi yang telah menarik perhatian dunia yaitu dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia, dengan menenggelamkan kapal ikan asing illegal yang dilaksanakan melalui kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dalam setiap pengeksekusian kapal ikan asing illegal selalu menarik perhatian masyarakat dalam negeri dan Internasional. Jadi jelas terlihat prinsip politik luar negeri Presiden Jokowi yaitu mengemukakan semua negara merupakan sahabat, tetapi apabila ada negara yang mengancam kedaulatan negara, hal itu tidak akan dapat ditolerir dan harus mendapatkan tindakan tegas dari Presiden Jokowi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan politik luar negeri Indonesia dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan. Pada prinsipnya dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara umumnya menggunakan landasan konstitusionalnya, namun seringkali pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya nasionalisme seorang pemimpin, tipe pemerintahan, serta demokrasi yang diterapkan dalam suatu negara juga mempengaruhi kualitas kebijakan politik luar negeri suatu negara. Faktor kepentingan, faktor kepemimpinan, dan dinamika politik dalam negeri dan internasional yang sedang terjadi juga

memberikan pengaruh. Politik luar negeri pada era Soekarno memiliki karakter *high profile*, anti kolonialisme dan menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis, masa pemerintahan inilah Indonesia sebagai pencetus adanya gerakan non blok dan menegaskan bahwa politik luar negerinya bersifat bebas dan aktif, walaupun dalam pelaksanaannya prinsip bebas aktif tidak diterapkan, Soekarno lebih cenderung memihak ke arah negara komunis seperti China dan Rusia. Dan tujuan utama dari politik luar negeri Indonesia pada masa ini adalah bentuk sikap penentangan terhadap segala bentuk penjajahan dan untuk mendapat pengakuan dari internasional.

Di masa pemerintahan Soeharto, pusat kekuasaan di pegang oleh pemerintah pusat dan membuat rakyat Indonesai tidak memiliki andil dan tidak didengar pendapatnya, banyak terjadi perubahan baik di sektor pemerintahan maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Politik luar negeri pada masa Soeharto memiliki karakter low profile dan cenderung ke negara Barat, prinsip politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif, dan lebih diterapkan dan terlaksana dengan baik di masa ini, Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat dan aktif dalam berbagai kegiatan di ranah internasional serta menjalin kerjasama dengan negara lain di beberapa sektor seperti perekonomian. Kemudian politik luar negeri pasca reformasi pada era kepemimpinan SBY, dimana politik luar negeri nya memiliki kesamaan pada rezim sebelumnya yaitu lebih berfokus terhadap masalah-masalah global. Indonesia berkontribusi aktif dalam upaya-upaya global untuk menemukan solusi atas masalah krisis, ekonomi, keamanan, energi, pangan, dan perubahan iklim. Kontribusi Indonesia direalisasikan dengan bergabung dalam G-20.

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan SBY lebih fokus untuk meningkatkan peran dan status Indonesia di percaturan politik internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional dan peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional bertujuan untuk meunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak untuk diakui sebagai negara yang berdaulat. Dan memang pada masa pemerintahan SBY Indonesia telah mendapatkan banyak pengakuan oleh negara-negara lain dan semakin diakui di mata dunia. Indonesia mengembangkan agenda-agenda kerjasama global demi memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi, politik luar negerinya cenderung ke dalam yaitu lebih mengutamakan penguatan dalam negeri, kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia, hal ini dapat terlihat segala bentuk kerja sama difokuskan pada kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi sehingga tidak terlalu fokus pada pembentukan citra positif di kancah internasional. Namun begitu dengan berfokus pada isu-isu dalam negeri bukan berarti Presiden Jokowi mengabaikan dinamika politik luar negerinya. Fokus kebijakan luar negeri juga tetap pada isu-isu ekonomi yang meberikan manfaat secara nyata bagi Indonesia. Sebagai contoh saat Indonesia sedang menggerakkan beberapa perundingan ekonomi yang meliputi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang diambil dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepentingan nasional yang nyata dan manfaatnya secara langsung.

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perumusan kebijakan politik luar negeri diperlukan penguatan kebijakan dalam negerinya, karena politik luar negeri yang dijalankan oleh negara haruslah sejalan dengan politik dalam negerinya. Walaupun pada dasarnya tidak ada kaitan erat antara domestic politik dengan kebijakan luar negeri. Politik dalam negeri sendiri aktornya berbeda dengan politik luar negeri, output kebijakannya jgugaterpisah. Jd tidak menunjukkan korelasi yang jelas antara yang terjadi pada dinamika politik dalam negeri dengan yang terjadi pada level internasional. Namun secara normatif kebijakan politik luar negeri Indonesia haruslah tetap sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia yaitu bebas aktif dan sesuai tujuan politik luar negeri Indonesia.

Namun kebijakan luar negeri suatu negara merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan nasional di level internasional. Peran aktif suatu negara dapat meningkatkan citra positif sehingga menimbulkan kepercayaan. Tingginya kepercayaan tersebut dapat memudahkan suatu negara dalam menjalin kerja sama konstruktif yang pada akhirnya dapat mencapai kepentingan nasional. Kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang paling nyata untuk menjadi pilihan dalam mencapai tujuan kepentingan nasional. Karena beragam ancaman membuat suatu negara tidak akan mungkin menghadapinya sendiri.

Saran

Bahwa secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat dipahami sebagai peran Indonesia di tingkat Internasional yang dapat dicapai selama Indonesia masih bebas dari intervensi atau pengaruh dari blok manapun, karena konsep politik luar negeri bebas aktif masih diterapkan hingga saat ini, hal ini sepenuhnya menjadi akar dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sehingga siapapun pemimpinnya, Indonesia harus berpegang teguh dan berkomitmen dengan prinsip kebijakan luar negeri yang independent dan aktif, dengan kata lain kebijakan independent dan aktif

bukanlah kebijakan netral, melainkan kebijakan yang tidak mensejajarkan Indonesia dengan negara adidaya dan tidak mengikat pada pakta militer apapun, karena kebijakan luar negeri Indonesia merupakan cerminan dari kepentingan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pembahasan tentang profil politik luar negeri Indonesia yang bersifat low profile dan hard profile dapat dibaca di Ganewati Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik, P2P-LIPI, Jakarta, 2008.
- Faizasyah, T. (2005). "Polugri 101" : 101 Kutipan Presiden SBY Mengenai Diplomasi RI dan Hubungan Internasional. Jakarta: Red & White Publishing. Hlm. 52
- PLNRI di Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. (2014). Jurnal Universitas Brawijaya Malang FISIP, hlm. 09
- Waluyo, A. (2014). Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Jadi Pijakan Pemerintahan Presiden Jokowi. Retrieved January 18, 2018, from VOA Indonesia: www.voaindonesia.com
- Situmorang, M. (2014). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. hlm. 69-71.
- Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. (2014, November 15). Retrieved January 18, 2018, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: www.kemlu.go.id
- Laporan Hasil Wawancara Nur Amaliyah (Mahasiswa Universitas Hasanuddin) dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri Boy Dharmawan pada tahun 2015
- Denmark, A. M., Sukma, R., & Parthemore, C. (2010). Crafting a Strategic Vision : A New Era of U.S - Indonesia Relations. Center for a New American Security, hlm. 41
- ELISABET, ADRIANA. (2016). GRAND DESAIN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA (2015-2025). JAKARTA: YAYASAN PUSTAKA OBOR INDONESIA & LIPI.
- Situmorang, Mangadar. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11(1), 68. [http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasi ona/article/view/1442](http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasi%20ona/article/view/1442)
- Alami, Athiqah Nur. (2016). Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru. e-journal.lipi.go.id, p.163-181.
- Aritonang, Diro. (1999). Runtuhnya Rezim dari pada Soeharto. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1999.
- Wuryandari, Ganewati (ed). Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.